

EFEKTIVITAS KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG

Ni Gusti Ayu Putri Nuryati

**Penata KKB Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten badung**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tabanan
Kediri, Bali, Indonesia

e-mail : igaputrinuryati01@gmail.com

Received : June, 2025

Accepted : September, 2025

Published : September, 2025

Abstract

This research focuses on the issue of the still high and continuously increasing population growth rate in Badung Regency, Bali Province, as well as the suboptimal implementation of the Kampung KB (Quality Family Village) program in Badung Regency. The objectives of this study are to determine the effectiveness of the Kampung KB program in Badung Regency, Bali Province; to identify the inhibiting factors affecting the effectiveness of the Kampung KB program in controlling the population growth rate in Badung Regency, Bali Province; and to understand the efforts made to improve the effectiveness of the Kampung KB program in controlling the population growth rate in Badung Regency, Bali Province. This research uses a descriptive method with an inductive approach, analyzed using Duncan's theory of effectiveness. The data collection techniques employed are interviews, observation, and documentation, with data analysis techniques including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research indicate that the Kampung KB program has been effective in controlling the population growth rate in Badung Regency, Bali Province. However, several obstacles remain, such as the insufficient quantity and quality of extension workers and the lack of supporting infrastructure and facilities for the Kampung KB program. The DP3AP2KB (Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning) has taken several steps, such as increasing the number of extension workers and allocating budgets to improve the infrastructure and facilities of the Kampung KB program. The results of this study show that although the Kampung KB program has been effective in controlling population growth, there are still challenges such as the lack of extension workers and inadequate facilities and infrastructure. The efforts made by DP3AP2KB to address these obstacles include increasing the number of extension workers and allocating funds to improve facilities and infrastructure.

Keywords : effectiveness, Kampung KB, community welfare.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada permasalahan yaitu masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yang terjadi dan terus bertambah setiap tahun di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, serta belum maksimalnya pelayanan program kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program kampung KB di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mengetahui faktor penghambat keefektifan program kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kampung KB sudah efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan

penduduk di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, juga terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang program kampung KB. Pihak DP2KBP3A melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan jumlah tenaga penyuluh serta mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana program kampung KB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kampung KB sudah efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, namun terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya tenaga penyuluh serta kurangnya sarana dan prasarana. Upaya Pihak DP2KBP3A untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan menambah jumlah tenaga penyuluh serta mengalokasikan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : *efektivitas, kampung KB, kesejahteraan masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia tentu sangat berpengaruh di segala aspek, baik itu aspek pembangunan daerah, kesehatan, pendidikan, maupun aspek kesejahteraan masyarakat. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat ini maka perlu menekan angka pertumbuhannya. Menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan tentang bagaimana mengatur atau mengendalikan tatanan kependudukan yang terkait dengan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk agar menjadi suatu tatanan penduduk yang merata dan berbanding dengan perekonomian masyarakat. Undang-undang No. 52 juga menjelaskan tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak menfokuskan pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga Berencana juga. Dengan adanya BKKBN tersebut diharapkan mampu menjawab atau dapat mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat terutama masalah pertumbuhan penduduk yang sangat mempengaruhi persoalan disegala aspek kehidupan.

Kampung KB merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagai wujud dari agenda prioritas pembangunan Nawacita periode 2015- 2019. Program tersebut merupakan implementasi dari tiga agenda prioritas sekaligus yakni agenda prioritas ke-3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, agenda prioritas

ke-5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, serta agenda prioritas ke-8 Revolusi Karakter Bangsa melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Ramadhani 2020). Pembentukan kampung KB yang digunakan sebagai solusi untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Program kampung KB merupakan salah satu realisasi dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan indikator pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Ketercapaian program ini dapat dinilai dari beberapa aspek yaitu aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Aspek kedua ini dapat dinilai dari beberapa indikator yakni peningkatan pengguna KB baru, peningkatan jumlah ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah remaja yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R), penurunan jumlah perempuan yang buta aksara, peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera dan KS-1 dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Zuhriyah, Indarjo, and Raharjo 2017).

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah : 1) Program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era orde baru; 2) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga

kecil berkualitas; 3) Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat; 4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 5) Mengangkat dan menggairahkan kembali program Keluarga Berencana (KB) guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2020-2030 (Bachtiyar and Wibawani 2017).

Manfaat Kampung KB dapat membangun masyarakat berbasis keluarga melalui delapan fungsi keluarga dan mensejahterakan masyarakat melalui integrasi program lintas sektor. Bila tak dicegah dengan program keluarga berencana (KB), penduduk Indonesia naik dua kali lipat dalam rentang 1990-2020. Tahun 1990 sebanyak 178,6 juta jiwa; tahun 2000, 205 juta jiwa, bila tanpa KB 285 juta jiwa, 80 juta kelahiran tercegah; tahun 2010 240 juta jiwa, bila tanpa KB 340 juta jiwa, 100 juta kelahiran tercegah. Serangan bukan hanya perang, tapi juga ledakan penduduk tak terkendali (Rosidah 2018). Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsa Lettiyani (2020), Universitas Indo Global Mandiri. Palembang. Dengan Judul Penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). (Lettiyani, Isabella, and Kencana 2020), Memperlihatkan hasil penelitian bahwa; Disposisi dalam pelaksanaan sikap implementor dan kelompok sasaran sudah cukup baik dalam merespon program kampung KB, hanya saja pengetahuan dan pemahaman implementor yang berada di Desa Sribunga belum begitu optimal, yang membuat kegiatan pelaksanaan program belum berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SOP-nya berpedoman pada buku petunjuk teknis kampung KB dan fragmentasi telah terstruktur. Sedangkan penelitian oleh Arizqi Istiadi (2012) Universitas Negeri Surabaya, dengan judul penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung

Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator di dalam teori tersebut yaitu : (1) komunikasi yang berisikan transmisi yang dilakukan dengan sosialisasi berupa undangan sosialisasi di balai desa dan di berikan pembekalan, kejelasan informasi masih belum dipahami betul oleh masyarakat, dan konsistensi program Kampung KB di lakukan dengan berdasarkan Juknis Kampung KB; (2) sumber daya yang berisikan sumber daya manusia dengan jumlah yang sudah mencukupi, anggaran yang didapatkan berasal dari BKKBN Provinsi, APBD, serta ADD, sementara fasilitas yang diberikan yaitu berupa tempat kegiatan dan juga tambahan buku binaan untuk para kader (Istiadi 2017).

Kabupaten Badung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang turut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan program kampung KB ini. Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabuputaen Badung secara bertahap. Tahap pertama dibentuk tahun 2016 yaitu 12 desa atau kelurahan, tahap kedua tahun 2023 dibentuk 38 desa dan tahun 2024 dibentuk di 12 kelurahan. Setelah terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kabupaten Badung terjadi peningkatan kesejahteraan terbukti dari Indeks Pembangunan Keluarga setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 56,65, tahun 2022 58,99, tahun 2023 67,45 dan tahun 2024 sebesar 68,74. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas keluarga.

Program kampung KB memiliki 2 fokus utama yaitu pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Dalam perkembangannya, tujuan kampung KB untuk jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya pada masyarakat pesisir dan pedesaan. Komitmen dan partisipasi lintas sektor serta masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan program ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengimplemntasikan peogram Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yaitu perbedaan anggaran yang di Kelola oleh Lembaga tingkat desa dan keluarahan

sehingga berakibat dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung KB

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang biasanya dikaitkan dengan aktivitas untuk mencapai tujuan (Hiah & Nafi'ah, 2023). Menurut Anderson dalam Putri & Wibawa (2023) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2016) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Disamping itu implementasi kebijakan secara sederhana menurut (Agustino, 2016) dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Grindle dalam Noviyanti et al (2021) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Mazmanian dan Sebastier dalam (Wahab, 2014) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Serta menurut (Kusumanegara, 2010) mendefinisikan secara lebih luas implementasi kebijakan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Menurut (Suharno, 2013) Keberhasilan implementasi sangat terkait

dengan beberapa aspek, diantaranya: pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Namun ketika membahas pelaksanaan suatu program, apakah itu sosial atau pendidikan, implementasi merupakan langkah penting. Tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan program itu sendiri dikenal dengan istilah pelaksanaan program. Implementasi program, menurut Charles O Jones dalam (Piay et al., 2023) merupakan salah satu bagian dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan program adalah usaha yang sah untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones berjalannya program didukung oleh tiga bidang kegiatan utama:

- a. Pengorganisasian
Diperlukan struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan program sehingga staf pelaksana dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang berkualitas kompeten dan berkualitas.
- b. Interpretasi
Pelaksana harus dapat menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai tercapai.
- c. Aplikasi atau penerapan
Perlu ada prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan sehingga tidak bertabrakan dengan program lainnya.

Menurut definisi yang diberikan di atas, implementasi program dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang diambil oleh orang atau otoritas terhadap sasaran atau objek dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui penggunaan organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pemerintah harus mengambil tindakan dalam bentuk menghasilkan uang dan mengelola sumber daya alam dan manusia agar dapat memenuhi tujuan program dengan baik. Hasil dari tindakan pertama disebut sebagai input kebijakan, dan proses implementasi kebijakan adalah tindakan kedua menurut Ratmiko dalam (Piay et al., 2023).

Dalam (Aryadi & Agustien, 2022) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) pada awalnya mengambil frasa Kampung Keluarga Berencana yang mempunyai pengertian satuan wilayah setingkat RW, Dusun, atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program

pembangunan antara program Bangga Kencana, serta pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus hidup. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) diprioritaskan pada wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, DAS dan wilayah nelayan diseluruh tanah air. Dalam kerangka pembangunan nasional, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dikembangkan sebagai strategi untuk mendukung terlaksananya pembangunan Indonesia dari pinggiran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berpedoman pada filsafat *post positivism*, digunakan pada penelitian yang memiliki objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti diibaratkan sebagai kunci dari instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Kabupaten Badung, Ketua Pokja yang menangani Kampung KB, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Penanggung jawab Program Kampung KB di tingkat Desa /Kelurahan, dan Masyarakat Kampung KB.

3, HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data

Peneliti melakukan penelitian Efektivitas Program Kampung KB dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kabupaten Badung Provinsi Bali menggunakan teori dari Duncan dalam Steers. Teori tersebut memiliki 3 indikator dalam mengukur efektivitas yaitu Pencapaian Tujuan, Adaptasi, dan Integrasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Kabupaten Badung telah menunjukkan pencapaian tujuan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya tanggapan positif masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut, serta adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Program Kampung KB.

3.2 Integrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Kabupaten Badung telah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari dua aspek utama. Pertama, pelaksanaan sosialisasi oleh pihak pelaksana, baik dari DP2KBP3A maupun dari kelurahan atau desa, telah dilakukan dengan baik. Hasil observasi di beberapa Kampung KB menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, dengan penyampaian materi yang menarik sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan berpartisipasi dalam program. Kedua, terdapat dukungan nyata dari instansi lain dalam pelaksanaan program, seperti keterlibatan dinas kesehatan dalam pemasangan alat kontrasepsi, serta dukungan dari pihak kelurahan atau desa yang menyediakan fasilitas tempat kegiatan sekaligus berperan sebagai pelaksana program di wilayah masing-masing.

3.3 Adaptasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Kabupaten Badung masih belum sepenuhnya berjalanefektif. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana

pendukung, yang utamanya diakibatkan oleh keterbatasan anggaran, baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun dari kelurahan atau desa setempat. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi peneliti, di mana masih terlihat kurangnya fasilitas di sejumlah Kampung KB, khususnya yang berada di wilayah kelurahan. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan program yang ada, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi dan ketertarikan mereka terhadap berbagai kegiatan dalam Program Kampung KB.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa Program Kampung KB telah menunjukkan efektivitas dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum mencapai tingkat optimal karena adanya sejumlah kendala, seperti terbatasnya jumlah tenaga penyuluh serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi hambatan tersebut, telah dilakukan berbagai langkah, antara lain peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh, pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, serta evaluasi program, dan pengalokasian anggaran yang memadai. Penulis juga berharap agar pemerintah, khususnya DP2KBP3A, terus berinovasi dalam pengembangan program serta meningkatkan kapasitas dan jumlah tenaga penyuluh yang terlibat.

4.1 Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu dan anggaran yang tersedia. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak tertentu saja, sehingga hasilnya mungkin belum mencerminkan pandangan secara menyeluruh.

4.2 Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):

Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal, sehingga diharapkan ke depannya dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa yang berkaitan dengan efektivitas Program Kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, khususnya kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Badung atas kesediaannya menjadi lokasi pelaksanaan penelitian. Penulis juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjalankan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung kelancaran proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Aryadi, T., & Agustien, S. (Eds.). 2022. *Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas*. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Kb Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
- Aminatuz. 2017. *Journal of Public Health Research and Development*. Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana.
- Bachtiyar, Nosa Arighi; Wibawani, Sri. 2017. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Hm, Rahman. 2019. *Journal of Civic Education*. Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang.
- Hiah,W, N, F., & Nafi'ah, B, A. 2023. Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2); 67-75. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.67-75>
- Istiadi Arizqi, Rosdiana Weni. 2012. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana, *Jurnal Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri

- Surabaya.
- Istiadi, A. 2017. *Implementasi program kampung keluarga berencana (studi pada kelompok sasaran keluarga dengan remaja di dusun waung desa sonoageng kecamatan prambon*.
- Kusumanegara, S. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. GAVA MEDIA.
- Lettiyani, E., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.36982/jpq.v5i3.1129>.
- Noviyanti, N, M., Raka, A, A, G., Larantika, A, A, A, D. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2): 85-96. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96>.
- Nur Fitriah Ramadhani Tukiman T. 2020. Implementasi Program Kampung KB Di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *PAJ Vol 2 No.4*. DOI: <https://doi.org/10.33005/paj.v2i4.65>.
- Piay, E. P. R., Pangkey, M. S., & Palar, N. (2023). *Implementasi Program Gotong Royong Di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. IX(4), 366–378.
- Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. 2023. Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1): 42-49. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>.
- Ramadhan, M. Hade, dan Zahratul Idami. 2020. *Journal of Governance and Social Policy*. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh.
- Rosidah, Afiyatur. 2018. *Makna Program Kampung Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Di Kecamatan Bangil*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharno, M. S. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan (2nd Ed.)*
- Wahab, S. A. 2014. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (Ed.)). PT Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (T. Admojo (Ed.)). CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zuhriyah, A., Indarjo, S., & Raharjo, B. 2017. Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 1(4), 1-13